

## ABSTRAK

### **Puspita Dewi Rahayu Ningsi, Jaelan Usman, dan Nur Wahid, Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai, Kecamatan Biringkanaya).**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan teori Edward III dengan indikator Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang hasilnya akan memperlihatkan faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan tersebut. Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif penulis bermaksud mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai dan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan yang ada dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Mandai. Serta apa saja yang menjadi faktor yang berperan dalam mengelola pedagang kaki lima di kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, 1) Komunikasi dalam implementasi kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai yang dilaksanakan, antara kepala cabang pasar Mandai dan pedagang sudah baik dan cukup memuaskan dilihat dari adanya penyampaian informasi melalui sosialisasi yang dilakukan. 2) Sumber daya dalam hal ini ketersediaan staf (SDM) dalam mengelola pedagang kaki lima sudah memadai sedangkan sumber daya berupa fasilitas untuk pedagang kaki lima masih terbatas. 3) Disposisi atau sikap penegak kebijakan baik dan cukup profesional dalam kesantunan dalam memberikan informasi dan keterikatan para penegak kebijakan. 4) Struktur Birokrasi dilihat dari mekanisme implementasi kebijakan yang mengikuti SOP saat ini, struktur birokrasi implementasi kebijakan sudah baik dan sesuai standar yang berlaku. langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola PKL sudah berjalan secara efektif dilihat dari komunikasi yang menyampaikan informasi secara langsung, sumber daya manusia yang memadai, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun belum efisien karena adanya faktor penghambat kurangnya fasilitas yang memadai yang didapatkan oleh para pedagang dan masyarakat selaku yang terdampak pada kebijakan ini.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, PKL**